

## **PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SLEMAN**

### ***IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM TO REALIZING ACCOUNTABILITY IN DEPARTMENT OF INVESTMENT AND INTEGRATED LICENSING SERVICE SLEMAN REGENCY***

Oleh : Reza Putra Kusuma dan F. Winarni, M.Si, Universitas Negeri Yogyakarta,  
rezaputrakusuma@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Sleman, mengetahui hambatan pelaksanaan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek Penelitian ini adalah Kepala DPMPT Kabupaten Sleman, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian DPMPT Kabupaten Sleman, Kepala Seksi Data dan Informasi DPMPT Kabupaten Sleman, Kepala Subbagian Keuangan DPMPT Kabupaten Sleman. Instrumen Penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data melalui Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di DPMPT Kabupaten Sleman mampu memenuhi kriteria dalam mewujudkan akuntabilitas. Unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah saling mempengaruhi dan saling memiliki peran dalam mewujudkan akuntabilitas. Dari hasil analisis, hambatan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di DPMPT Kabupaten Sleman yaitu kurangnya sumber daya dana dan kurangnya pemahaman pegawai mengenai esensi sistem pengendalian intern pemerintah. Menghadapi hambatan tersebut, dilakukan perhatian yang lebih dalam pelaksanaan penganggaran sehingga tidak terjadi kekurangan anggaran ketika program terlaksana dan memberikan pemahaman lebih mengenai sistem pengendalian intern pemerintah kepada pegawai sehingga pegawai mampu memahami esensi dari sistem pengendalian intern pemerintah.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas

#### **Abstract**

*The purpose of this research was to analyze the implementation of Government Internal Control System in Department of Investment and Integrated Licensing Service Sleman Regency, to know the inhibitions and attempt to resolve the inhibitions. This research used qualitative approach with descriptive method. The subject of this research is Head of department, General and Personel Subsection, Data and Information Subsection, and Finance Subsection in Department of Investment and Integrated Licensing Service Sleman Regency. Data collected by interview, observation, and documentation. Data validity checking has done by resource triangulation method. The process of data analysis include data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The result showed that Government Internal Control System Implementation in Department of Investment and Integrated Licensing Service Sleman Regency could fulfill the requirements to realizing accountability. The element of Government Internal Control System was interplayed and had a role to realizing accountability. Inhibiting factors were lacked by finance and employees lack of understanding about Government Internal Control System. To resolve these problem, Department of Invesment and Integrated Licensing Service Sleman Regency must give more attention in budgeting and give more undersanding about Government Internal Control System to all employees.*

**Keywords:** Government Internal Control System, Accountability

## **PENDAHULUAN**

Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia merupakan salah satu tujuan pemerintah. Dalam mencapai tujuannya ini pemerintah melakukan berbagai cara, salah satunya dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dilakukan di semua tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Perbedaan yang mencolok dari era sebelumnya adalah saat ini, daerah memiliki hak yang lebih dalam mengatur pemerintahannya.

Akuntabilitas menjadi hal yang penting dalam mewujudkan *Good Governance*. Hal ini dikarenakan akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja tetapi menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Halim, 2007:13).

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang

bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, manajerial, dan program (Haris, 2007:349). Terkait permasalahan akuntabilitas, penyerahan laporan hasil evaluasi kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Budaya ini harus secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/ masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Asman Abrur mengungkapkan mayoritas Pemerintah daerah (Pemda) masih memiliki nilai akuntabilitas dibawah standar, yaitu di bawah B sepanjang 2016. Masih banyak pemda yang memiliki nilai akuntabilitas rendah tersebut menyebabkan pembangunan tidak sesuai harapan, sehingga telah menyebabkan pemborosan keuangan hingga mencapai nilai Rp. 400 Triliun ([www.bisnis.liputan6.com](http://www.bisnis.liputan6.com) diakses pada tanggal 03 Maret 2017).

Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut

ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Widjaja, 2010:195). Pemerintah menerbitkan kebijakan yang mengatur pengendalian intern organisasi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tindakan pengendalian diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan SPIP terletak pada unsur-unsur dalam SPIP yang belum terlaksana sepenuhnya oleh instansi pemerintahan yang menerapkan SPIP.

Begitu pula di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, badan ini merupakan salah satu badan yang telah menerapkan SPIP di Kabupaten Sleman. Penerapan SPIP tidak berarti menghilangkan permasalahan yang ada. Nardi, S.IP, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mengatakan masih ada

permasalahan seperti penyerapan anggaran yang tidak sesuai target dan menyimpang dalam pelaksanaan anggaran (APBN /APBD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. “Dalam perencanaan anggaran untuk kegiatan sudah dapat terpenuhi tetapi dalam pelaksanaan kegiatan belum dapat menjangkau secara keseluruhan”. Selain itu ada permasalahan kemampuan pegawai DPMPT Kabupaten Sleman dalam melakukan perencanaan dimana pegawai belum mampu menerapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dari DPMPT Kabupaten Sleman.

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas di DPMPT Kabupaten Sleman. Gambaran tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan untuk menyelesaikan masalah terkait akuntabilitas. Selain itu penelitian ini juga dilakukan sebagai tugas akhir peneliti dan hasil dari penelitian ini dibuat sebagai artikel yang dipublikasikan dalam bentuk *e-journal*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai

pedoman dalam melakukan penelitian. Dalam PP No 60 Tahun 2008 terdapat unsur-unsur yang dapat dijadikan indikator dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Unsur tersebut adalah Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan. Lima indikator tersebut dirasa paling tepat untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di DPMPT Kabupaten Sleman. Hal ini karena masih banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di DPMPT Kabupaten Sleman. Jadi dengan menggugurkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai indikator maka seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat diketahui permasalahannya dan dapat dicari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moleong (2011: 4) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif

kualitatif karena desain deskriptif kualitatif dapat digunakan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas di DPMPT Kabupaten Sleman secara lebih mendalam.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini mengambil tempat di Kota Yogyakarta dan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2017 hingga 31 Agustus 2017.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini antara lain :

1. Bapak Sutardi Gunarto sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
2. Bapak Nardi sebagai Kepala subbagian kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
3. Bapak Agus Puguh Santoso sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
4. Ibu Endang Siti Fatimah sebagai Kepala Subbagian Keuangan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman.

### **Prosedur**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui metode wawancara semi terstruktur. Metode ini dilakukan dengan cara membuat garis besar apa yang akan ditanyakan yang tentunya masih dapat dikembangkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kemudian *non partisipatif observation* dilakukan dengan cara mengamati apa yang senyatanya ada di lapangan tanpa harus mengikuti langsung kegiatan yang dilakukan informan. Selanjutnya teknik dokumentasi dilakukan dengan menganalisis informasi dari dokumen atau catatan penting. Seperti kebijakan pemerintah, laporan, berita.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari internet, buku, LAKIP DPMPTT Kabupaten Sleman, dan SOP pelaksanaan SPIP di DPMPTT Kabupaten Sleman yaitu Perbup No. 30 Tahun 2010 tentang SPIP.

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti terjun

langsung ke lapangan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, pedoman observasi serta dokumen-dokumen yang di dapatkan dari data sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan subjek terkait dalam penelitian ini, observasi kegiatan DPMPTT Kabupaten Sleman terkait dengan SPIP, dan dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi metode. Peneliti melakukan triangulasi metode. Peneliti mengumpulkan data hasil wawancara dengan data observasi serta dokumentasi. Setelah itu peneliti membandingkan ketiga data tersebut yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan mengenai bagaimana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas di DPMPTT Kabupaten Sleman.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif Milles dan Huberman (1984). Teknik ini meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Bungin, 2012:297).



## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di DPMPPPT Kabupaten Sleman**

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Dalam Kurniati (2011:16), Lingkungan pengendalian melingkupi sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian intern dalam suatu organisasi. Lingkungan dibentuk oleh seluruh unsur di sebuah organisasi termasuk SDM.

##### **a. Integritas dan Nilai Etika Organisasi**

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, integritas diartikan sebagai konsistensi antara nilai dan tindakan. Dalam penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan dengan baik oleh DPMPPPT Kabupaten Sleman. Penegakan integritas yang dilakukan DPMPPPT Kabupaten Sleman adalah dengan memegang teguh sumpah mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan tugas mereka sebagai orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian integritas di DPMPPPT Kabupaten Sleman dilakukan dengan menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Untuk membangun nilai etika dalam organisasi, DPMPPPT Kabupaten

Sleman membentuk kode etik pegawai yang nantinya akan mengatur pegawai supaya mampu beretika dalam melakukan tugasnya.

##### **b. Komitmen Terhadap Kompetensi**

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi (Soekidjan, 2009:3). Untuk menciptakan komitmen terhadap kompetensi yang baik, pegawai DPMPPPT Kabupaten Sleman diwajibkan untuk menandatangani pernyataan tertulis mengenai sebuah janji tertulis. Dengan adanya janji dalam melaksanakan tugas secara tertulis berarti sudah adanya kemauan/ kesadaran pegawai untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kompetensi masing-masing.

##### **c. Kepemimpinan yang Kondusif**

Menurut Soerjono Soekanto (2001:318), kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin atau *leader* untuk mempengaruhi orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya. Kepemimpinan yang kondusif dilakukan oleh Pimpinan DPMPPPT Kabupaten Sleman dengan melakukan monitoring terhadap kinerja pegawai baik dalam melakukan pelayanan ataupun

mengawasi perilaku para pegawai apakah sudah sesuai dengan kode etik atau belum.

d. Struktur Organisasi

Menurut Hasibuan (2010:128) struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Pembentukan struktur organisasi di DPMPT Kabupaten Sleman sesuai dengan Perbup Nomor 90 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi. Jadi struktur organisasi sudah sesuai dengan struktur organisasi yang semestinya dan tidak ada permasalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan struktur organisasi di DPMPT Kabupaten Sleman.

e. Delegasi dan Pembagian Wewenang

Dalam PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP menjelaskan mengenai pendelegasian dan wewenang merupakan pemberian tugas dan tanggung jawab oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Delegasi dan pembagian wewenang di DPMPT Kabupaten Sleman sudah diatur melalui SK Bupati yang mengatur masalah penempatan

pegawai dan wewenang pegawai sesuai dengan bidangnya.

f. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Menurut Thoha (2012:7) menyatakan bahwa pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Pembinaan dilakukan dengan mengikuti Diklat baik yang diadakan oleh pusat maupun daerah dan yang dilakukan DPMPT Kabupaten Sleman sendiri yaitu dengan pemberian motivasi dalam bekerja terhadap pegawai.

g. Pengawasan Intern

George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan Intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peran APIP di DPMPT selain melakukan pengawasan terhadap jalannya sistem tetapi juga melakukan *reward and punishment*

yang akan diberikan dalam bentuk apresiasi terhadap pegawai dan apabila ada pegawai yang menyalahi aturan atau kode etik.

## 2. Penilaian Risiko

Menurut Peltier (2001:21) risiko merupakan kemungkinan terjadinya beberapa ancaman yang mudah menyerang. Hal yang menjadi perhatian serius dalam penilaian risiko oleh DPMPT Kabupaten Sleman adalah permasalahan anggaran. Adanya perbedaan jumlah anggaran pada saat dianggarkan dan ketika kegiatan dilaksanakan menjadi sebuah permasalahan bagi DPMPT Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan penilaian risiko yang dilakukan DPMPT Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik.

## 3. Kegiatan Pengendalian

### a. Reviu Kinerja Pegawai

Hal yang dilakukan dalam reviu kinerja pegawai di DPMPT Kabupaten Sleman adalah dengan melihat SKP setiap akhir tahun dan menilai apakah kinerja pegawai sudah baik atau belum.

### b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Hal yang dilakukan DPMPT Kabupaten Sleman dalam

melakukan pembinaan SDM adalah dengan mengikuti berbagai macam diklat baik yang diadakan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Selain itu pemberian motivasi kepada pegawai juga menjadi salah satu sarana dalam pengembangan SDM di DPMPT Kabupaten Sleman.

### c. Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi

DPMPT sudah memiliki website yang berisi berbagai macam informasi mengenai DPMPT Kabupaten Sleman sendiri. Selain itu adanya Portal Pelayanan Perizinan juga membantu tugas dalam melakukan pelayanan perizinan. Pengelolaan yang dilakukan terhadap sistem informasi dilakukan oleh Seksi data dan informasi dengan melakukan perawatan dan pembaharuan supaya dapat diakses.

### d. Pengendalian Fisik Aset

Pengendalian Fisik Aset yang dilakukan adalah dengan melakukan perawatan terhadap aset-aset yang berguna dalam menjalankan tugas. Apabila ada permasalahan pada suatu aset



maka akan diadakan pemulihan terhadap aset tersebut.

e. Penetapan Reviu Indikator Ukuran Kinerja

Hal yang dilakukan adalah dengan membandingkan secara terus menerus kinerja pegawai DPMPT Kabupaten Sleman dengan sasaran kinerja pegawai yang sudah ditetapkan dan selisihnya akan dianalisis lebih lanjut.

f. Pemisahan Fungsi

Hal ini dilakukan oleh kepala dinas dimana kepala dinas harus mengkomunikasikan dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dalam hal pelayanan tidak dikendalikan satu orang. Menurut peraturan yang ada dalam melakukan pembuatan perizinan, pemohon diminta untuk mengikuti prosedur yang ada.

g. Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting

Dalam melakukan otorisasi transaksi dan kejadian penting di DPMPT Kabupaten Sleman, Kepala dinas menetapkan syarat dan ketentuan otorisasi dan mengkomunikasikannya kepada seluruh pegawai.

h. Pencatatan Akurat dan Tepat Waktu

Pencatatan akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian dilakukan oleh seluruh pimpinan di DPMPT Kabupaten Sleman. Transaksi dan kejadian harus diklasifikasikan dengan tepat dan segera untuk melakukan pencatatan. Hal ini nantinya yang akan dimasukkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) DPMPT Kabupaten Sleman.

i. Pembatasan Akses Sumber Daya

Pimpinan DPMPT Kabupaten Sleman memberikan akses kepada pegawai untuk menggunakan Sumber Daya yang ada sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dalam rangka pembatasan akses sumber daya.

j. Akuntabilitas Sumber Daya

Dalam pelaksanaan Akuntabilitas Sumber Daya, pegawai DPMPT Kabupaten Sleman diberi tanggung jawab terhadap Sumber Daya serta ditugaskan untuk melakukan review dan membuat laporan secara berkala.

k. Dokumentasi Sistem Pengendalian Intern

DPMPT Kabupaten Sleman melakukan Dokumentasi Sistem Pengendalian Intern dengan

memiliki dan memelihara dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata digunakan untuk pengambilan keputusan (Jogiyanto, 1999:692). Menurut Thoha (2012:167), Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dalam penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain.

DPMPPT Kabupaten Sleman memiliki sistem informasi online yang digunakan untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DPMPPT Kabupaten Sleman dan bisa diakses dengan mudah oleh semua orang. Informasi yang diberikan biasanya hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan penanaman modal dan pelayanan permohonan perizinan. Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki telepon ekstension yang menghubungkan seluruh dinas di Kabupaten Sleman sehingga memudahkan dalam melakukan

komunikasi baik secara internal maupun eksternal.

#### 5. Pemantauan Berkelanjutan

Dalam PP No 60 Tahun 2008, Pemantauan dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pemantauan di DPMPPT Kabupaten Sleman dilakukan oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Bidang Umum dan Kepegawaian. Adanya keterbukaan informasi memudahkan proses pemantauan. Pemantauan dilakukan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan. Pimpinan juga melakukan evaluasi terpisah, yaitu evaluasi per bidang dan per unsur SPIP agar pemimpin dapat menemukan masalah dalam sistem itu sendiri. Sampai saat ini, tidak ada masalah yang berarti dalam pelaksanaan pemantauan SPIP.

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan SPIP di DPMPPT Kabupaten Sleman**

##### 1. Faktor Pendukung

##### a. Adanya Sistem Informasi Online

Penerapan sistem informasi di DPMPPT Kabupaten Sleman juga berbasis online sehingga dapat diakses dengan menggunakan jaringan internet dimana pun dan kapan pun. Penyelenggaraan SPIP

menjadi lebih cepat dan mudah berkat sistem informasi online. Pemimpin bisa mengakses data bawahan-bawahannya dengan menggunakan data yang tersimpan dalam komputer.

b. Adanya Aturan yang Tegas

DMPPT Kabupaten Sleman dalam mendisiplinkan aparaturnya, menerapkan penghargaan dan sanksi yang tegas. Berdasarkan UU ASN, selain gaji pokok terdapat juga tunjangan kinerja atau remunerasi bagi PNS. Tunjangan kinerja sendiri berfungsi untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara.

c. Adanya Dukungan dari Masyarakat

Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya melalui kritik dan saran yang nantinya akan menjadi masukan dan membantu proses berjalannya SPIP di DMPPT Kabupaten Sleman.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Sumber Daya Dana

Di DMPPT Kabupaten Sleman jumlah anggaran ketika perencanaan dan pelaksanaannya berbeda sehingga penyelenggaraan SPIP menjadi

belum maksimal. Sama halnya dengan program pemerintah lainnya juga memerlukan dengan baik.

b. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap esensi dari SPIP

Di DMPPT Kabupaten Sleman, SPIP dapat berjalan dengan cukup baik. Namun, dalam praktiknya para pegawai mematuhi SPIP karena adanya ancaman aturan yang tegas. Akan lebih baik jika para pegawai DMPPT Kabupaten Sleman bisa memahami tujuan SPIP yang sebenarnya sehingga memunculkan kesadaran untuk melaksanakan SPIP dengan sebenar-benarnya.

**Peran Sistem SPIP dalam mewujudkan Akuntabilitas**

Output dari sebuah SPIP adalah berupa laporan kinerja dan evaluasi dari setiap bagian yang mencakup hal-hal yang ada di lingkungan pengendalian. SPIP di DMPPT Kabupaten Sleman dapat dilakukan dengan baik sehingga mampu memenuhi kriteria akuntabilitas. Sebagai sebuah sistem, unsur-unsur dalam pengendalian internal pemerintah saling mempengaruhi dan mempunyai peran masing-masing dalam mewujudkan akuntabilitas.

Berdasarkan penelitian dari Eli Budi Santoso (2016), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap lembaga yang melaksanakannya baik dalam hal keuangan maupun kinerja pegawai tetapi dengan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum tentu akan meningkatkan akuntabilitas.

SPIP menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berarti bahwa para pengambil keputusan baik di sektor pemerintah, swasta, dan organisasi - organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga - lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya, tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Dengan adanya SPIP, maka diharapkan adanya monitoring dan evaluasi internal dapat digunakan sebagai ukuran penilaian keberhasilan organisasi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas di DMPPT

Kabupaten Sleman, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di DMPPT Kabupaten Sleman sudah baik tetapi ada beberapa unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan dengan baik seperti pelaksanaan kode etik yang belum berjalan dengan maksimal yang dikarenakan lingkungan DMPPT Kabupaten Sleman yang masih baru dan masih adanya permasalahan dalam penilaian risiko yang berhubungan dengan anggaran dimana anggaran yang direncanakan tidak sesuai dengan anggaran ketika kegiatan dilaksanakan.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di DMPPT Kabupaten Sleman adalah adanya sistem informasi online, adanya aturan yang tegas, dan adanya dukungan dari masyarakat. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di DMPPT Kabupaten Sleman yaitu kurangnya sumber daya dana dan kurangnya pemahaman pegawai DMPPT Kabupaten Sleman mengenai esensi sistem pengendalian intern pemerintah.

Pelaksanaan SPIP di DMPPT Kabupaten Sleman dapat dilakukan dengan baik dan sudah memenuhi

kriteria dalam mewujudkan akuntabilitas. Sebagai sebuah sistem, unsur-unsur dalam pengendalian internal pemerintah saling mempengaruhi dan mempunyai peran masing-masing dalam mewujudkan akuntabilitas.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Memberikan perhatian lebih dalam hal penganggaran supaya tidak terjadi permasalahan seperti kurangnya jumlah anggaran ketika program sudah dilaksanakan.
2. Memberikan pemahaman lebih mengenai sistem pengendalian intern pemerintah kepada para pegawai sehingga pegawai mampu memahami esensi dari sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah, Buku Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amin Widjaja Tunggal. (2010). *Teori dan Praktek Auditing*. Jakarta: Harvarindo.
- Basri, Faisal, Haris Munandar. (2007). *Lanskap Ekonomi Indonesia, Kajian, dan Renungan Terhadap Masalah-*
- Masalah Struktur, Transformasi Baru dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- George R. Terry. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Jogiyanto. (1999). *Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya..
- Nurmayanti. (2017). *Akuntabilitas Pemda Masih Buruk, Negara Boros Rp. 400 Triliun*. Diakses Tanggal 18 April 2017 dari [www.bisnis.liputan6.com](http://www.bisnis.liputan6.com)
- Peltier, Thomas, R. (2001). *Information Security Risk Analysis*. USA: Auerbach
- Soegiarto Soekidjan, Sp, KJ,. (2009). *Komitmen Organisasi Sudahkah Menjadi Bagian Dari Kita*.
- Soerjono Soekanto. (2001). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Thoha, Miftah. (2012). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Valery G. Kumaat. (2011). *Internal Audit*. Yogyakarta: Erlangga.



(2008). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp: 586168 Psw: 247, 248, 249

**Formulir Penulisan dan Pengunggahan Artikel E-Journal Mahasiswa  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

<b>Nama Mahasiswa</b>	Reza Putra Kusuma
<b>NIM</b>	13417141060
<b>Judul Tugas Akhir Skripsi</b>	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman
<b>Nama Dosen Pembimbing</b>	F. Winarni, M.Si
<b>Nama Dosen <i>Reviewer</i></b>	Sugi Rahayu, M.Pd, M.Si
<b>Tanggal Ujian Skripsi</b>	18 Oktober 2017

Yogyakarta, 17 November 2017

Menyetujui,

Dosen *Reviewer*

(Sugi Rahayu, M.Pd, M.Si)  
NIP. 19540807 197803 2 002

Dosen Pembimbing

(F. Winarni, M.Si)  
NIP. 19590119 198702 2 002

Pengelola *E-Journal*  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara

(Pandhu Yuanjaya, S.Sos, MPA)  
NIP. 11510900713614